

Turnitin Originality Report

Processed on: 25-Jan-2022 10:45 WIB
 ID: 1747586746
 Word Count: 10786
 Submitted: 1

Skripsi FH UWKS By Agnes 2018

Similarity Index
30%

Similarity by Source
 Internet Sources: 30%
 Publications: 9%
 Student Papers: 11%

4% match ()

[Ginting, Muhammad Ilham. "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani \(Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang\)". 2018](#)

3% match (Internet from 07-Sep-2021)

http://e-journal.uajy.ac.id/24605/2/170512931_bab1.pdf

2% match (Internet from 25-Jul-2020)

http://digilib.uinsgd.ac.id/16765/2/2_abstrak.pdf

2% match (Internet from 07-Aug-2020)

https://mafia.doc.com/download-fakultas-hukum-unsoed_5a03f8071723ddeb23a2d90.html

1% match (Internet from 10-Apr-2018)

<http://digilib.unila.ac.id/3078/16/BAR%20II.pdf>

1% match (Internet from 05-Jun-2018)

<http://digilib.unila.ac.id/31551/3/SKRIPSI%20TANPA%20RAB%20PEMBAHASAN.pdf>

1% match (Internet from 01-Apr-2020)

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/orndukhkm/Putusan%20MK%20Nomor%2055-PUU-VIII-2010%20Tentang%20R%20UU%20No.%2018%20Tahun%202004%20Tentang%20Perkebunan.pdf>

1% match (Internet from 07-Dec-2021)

<http://docplayer.info/60368160-Lembaran-negara-republik-indonesia.html>

1% match (Internet from 20-Dec-2020)

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku%20Ajar%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf>

1% match (publications)

[Desy Nurkristia Tejawati, Fries Melia Salviana, Shanti Wulandari. "Welfare State dalam Urgensi Land Banking di Indonesia". Kosmik Hukum, 2021](#)

1% match (Internet from 29-May-2020)

<https://banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/Perda-5-Thn-2016-ttg-Pengelolaan-Sawit-Dlm-Proses1.pdf>

1% match (Internet from 15-Mar-2016)

http://eprints.undip.ac.id/16310/1/AHMAD_ZAZILI.pdf

1% match (Internet from 24-Oct-2020)

<https://hakhilmy.wordpress.com/2017/12/05/strategi-dan-tantangan-dalam-pengembangan-gabungan-kelompok-tani-gapoktan-sebagai-kelembagaan-ekonomi-di-pedesaan/>

1% match (Internet from 05-Jan-2022)

<http://Repository.Umsu.Ac.Id/bitstream/123456789/15820/1/Revisi%20Skripsi%20Ihsan%20Habibi.pdf>

1% match (Internet from 13-Aug-2020)

<http://repository.unair.ac.id/96628/4/4.%20RAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

1% match (Internet from 24-Jul-2018)

<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/1MK/article/download/1532/1199>

1% match (Internet from 13-Apr-2016)

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_21.pdf

1% match (Internet from 19-Jun-2021)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60484dde630a8/batas-luas-tanah-hak-milik-diindonesia/>

1% match (Internet from 17-Jul-2021)

<http://repository.undaris.ac.id/243/1/Buku%20Hukum%20Untuk%20Petani.pdf>

1% match (Internet from 10-Nov-2012)

<http://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%20%2018%20Tahun%202004%20Tentang%20Perkebunan%202011>

1% match (Internet from 12-Jul-2018)

<https://id.123dok.com/document/dzx3nkwz-perlindungan-konsumen-terhadap-jasa-pelayanan-tukang-gigi-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen.html>

1% match (Internet from 26-Mar-2019)
<http://repository.unpas.ac.id/41917/2/BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 26-Mar-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/229601-perindungan-hukum-kontrak-dalam-perspek-afc9a717.pdf>

1% match ()
 ARIYANTI, LIA. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAANBERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHAAGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAMPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo KenconoKecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)". 2018

1% match (Internet from 13-Jan-2022)
<http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/14013/KOMPEDIUM%20HUKUM%20UU%20PERTANIAN.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 05-Jun-2017)
<http://binfar.kemkes.go.id/?did=MJU4LmhvdGxpbms%3D&wpmact=process>

1% match (Internet from 18-Jan-2022)
<http://repository.iainmadura.ac.id/378/1/PIH%20dan%20IH%20%28Theadora%20Rahmawati%29%20B5%20fIX.pdf>

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Jawa Timur merupakan tempat yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Berbagai kegiatan pertanian mulai dari budidaya hingga pasca panen dapat dijadikan daya tarik tersendiri untuk kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, lahan perkebunan di Indonesia mempunyai keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.¹ Fungsi lahan perkebunan yang dimiliki petani memiliki banyak manfaat, seperti dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Lahan perkebunan petani memiliki keindahan alam yang menarik penduduk lokal bahkan wisatawan lain untuk menikmati keindahan ini. Namun lahan perkebunan tersebut tidak ada yang menjaga, maka orang lain akan masuk ke perkebunan secara sembarangan dan berdampak negatif bagi petani perkebunan dan masyarakat sekitar. Akibatnya, wisatawan yang memasuki perkebunan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi para petani. Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah dilihat pada aspek yuridis, untuk karena itu mereka sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan jika 1 <https://ejournal.undiksha.ac.id/>, 2017, "krisis petani berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia", diakses pada 20 September 2021, pukul 20.23 WIB terjadi perpecahan. Sebagaimana yang diatur di peraturan perundang-undangan sudah ditentukan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 (yang selanjutnya disebut UU No.19 Tahun 2013) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.² Merujuk pada konsep negara kesejahteraan maka : 1. Negara harus menjamin bahwa setiap individu dan keluarga memperoleh pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhannya, 2. Negara harus memberikan perlindungan jika individu dan keluarga mereka berada dalam situasi rentan tidak memungkinkan, 3. Semua warga negara harus dijamin memiliki pelayanan terbaik. Penilaian Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang gagal bukan hanya sekedar kekhawatiran belaka tetapi bagaimana mengatasi semua itu dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, dalam Pembukaan UUD No. 19 Tahun 2013 bahwa petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Kesejahteraan dalam hal ini adalah jaminan dan pembuktian dari keputusan hukum tergantung pada nilai tertentu berdasarkan kepentingan masyarakat umum yang terus berubah sehingga dapat mencari kepastian atas kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam praktik Welfare State, upaya dari 2 Suciati, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan", Jurnal Moral Kemasyarakatan -Vol.1, No.2, Hal. 149-161, diakses pada 20 September 2021, pukul 21.23 WIB pemerintah pemerintah tidak perlu sesuai aturan yang diterapkan, namun juga dapat didasarkan pada standar Freies Ermessen, Welfare State dinyatakan dalam tujuan penyelenggaraan negara Indonesia dan tertuang dalam bagian keempat dari pembukaan perubahan keempat UUD 1945 yang berbunyi "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Pembukaan tersebut bertujuan untuk mendorong kesejahteraan umum agar lebih maju.³ Petani harus diberikan perlindungan dan pemberdayaan guna mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan yang diatur dalam Pasal 69 UU No. 19 Tahun 2013, menyatakan "Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membantu dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani". Namun, UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan "setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima hibah dari pemerintah wajib berbadan hukum".³ Desy Nurkristia Tejawati, Fries Mella Salviana, Shanti Wulandari, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/10237/4036>, Jurnal Welfare State dalam Urgensi Land Banking di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto -Vol. 21 No. 2, 2021, Hal. 04, diakses pada tanggal 06 Desember 2021, Pukul 08.31 WIB Badan hukum merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak atau subyek hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang diikuti dengan cakap hukum dan kewenangan hukum. Subyek Hukum dalam pengertian hukum : Natuurlijke Person (orang perseorangan) adalah orang perseorangan terdapat Pasal 1329 Burgelijk Wetboek (yang selanjutnya disebut BW). Peran pemerintah semakin diperlukan pada zaman saat ini. Maraknya tempat wisata yang menampilkan pesona alam, perkebunan, dan pemandangan gunung menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur. Alternatif pengembangan sektor pertanian yang berubah menjadi sektor wisata menjadi pilihan belakangan ini.⁴ Salah satunya adalah perkebunan Brakseng yang ada di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumijati, Kota Batu, Jawa Timur. Akhir akhir ini perkebunan warga di daerah Brakseng ini menjadi ramai dikunjungi. Perkebunan para petani menjadi sarana yang bagus untuk berswafoto. Brakseng merupakan daerah pertanian tetinggi yang ada di Kota Batu, tepatnya pada ketinggian 1700 mdpl. Lokasinya memiliki cuaca yang dingin dan jika beruntung, pengunjung tempat ini disuguhkan pemandangan seperti di atas langit atau awan.⁵ Brakseng bukan termasuk tempat wisata resmi yang disahkan oleh pemerintah. Namun, kawasan ini sudah ramai sejak 2 tahun terakhir. Sehingga, pengunjung yang datang disini tidak perlu 4 Siwi Harning Pambudi, "Strategi Pengembangan Agrowisata dalam Mendukung Pengembangan Pertanian", Hal. 166 5 <https://m.merdeka.com/jatim/lanskap-brakseng-pilihan-tepat-nikmati-keindahan-kota-batu-dari-ketinggian.html>, diakses pada 20 September 2021, Pukul 22.05 WIB membayar tiket seperti tempat wisata pada umumnya. Pengunjung dengan bebas dan leluasa berswafoto